



ETNIK : Jurnal Ekonomi – Teknik

ISSN: 2808-6694 (Online); 2808-7291 (Print)

Jurnal Homepage <https://etnik.rifainstitute.com>

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar

Muhammad Yahya¹, Tituk Diah Widajantie²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Indonesia

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Submit 10 April 2023

Accepted 15 April 2023

Published 20 April 2023

Email Author:

muhammadyahyacoy@gmail.com

tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

An independent region is when the region's own-source revenue is the main source of revenue in financing regional expenditures so that it does not depend on loans to stakeholders, the provincial and central governments. The purpose of this research was to examine and analyze the effect of general allocation funds, local revenue and spending capital on the regional financial independence of Blitar City. The research sample is 10 years old, originating from the Blitar City budget report for the 2012-2021 period. Data analysis techniques using SPSS. The results of the study show that the General Allocation Fund and Capital Expenditure have no effect on Regional Financial Independence, while Regional Original Revenues have an effect on Regional Financial Independence.

Keyword– General Allocation Fund, Regional Original Revenue, Capital Expenditures and Regional Financial Independence.

ABSTRAK

Daerah yang mandiri adalah apabila pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan yang utama dalam membiayai pengeluaran daerah sehingga tidak bergantung pada pinjaman kepada stakeholder, pemerintah provinsi maupun pusat. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Blitar. Sampel penelitian berjumlah 10 Tahun yang berasal dari laporan realisasi anggaran Kota Blitar periode 2012-2021. Teknik analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata Kunci – Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Ada kepercayaan yang kuat akan nilai kemandirian lokal dalam budaya Indonesia. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Gagasan di balik pengalihan kekuasaan ini adalah bahwa warga negara lebih tahu daripada orang lain apa yang dibutuhkan komunitas mereka dari pemerintah mereka dan tingkat layanan apa yang dianggap baik.

Yang dimaksud dengan “kemandirian keuangan daerah” adalah bahwa pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan penerimaan pajak dan pungutan yang dipungut di daerah. Daerah yang mandiri secara finansial adalah daerah yang tidak mengandalkan pinjaman kepada pemangku kepentingan, pemerintah provinsi atau federal, atau pemerintah pusat untuk pendanaannya. (Malau & Parapat, 2020).

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari Laporan Realisasi Anggaran masing-masing daerah. Ini menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan dan dihabiskan masing-masing daerah pada tahun anggaran yang relevan. (LRR). APBD adalah kerangka kerja daerah untuk mengetahui berapa banyak uang yang tersedia dan bagaimana mengelolanya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran pribadi atas aset tetap dan aset lainnya yang berpotensi menghasilkan uang selama lebih dari satu tahun. Rencana belanja modal besar-besaran tersebut kemungkinan akan memberikan efek stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Daripada hanya mengandalkan dana federal, pemerintah daerah harus memanfaatkan sumber daya alam daerah mereka sebaik-baiknya. (Mahardika, 2022).

Ada aturan yang mengamanatkan daerah melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu jenis pendapatan yang dikhususkan untuk daerah itu. Pemerintah daerah dapat menggunakan PAD di tingkat daerah untuk berinvestasi dalam memperluas otonomi daerah dengan cara yang sesuai dengan kekuatan khusus daerah tersebut. Pemerintah kota harus bertanggung jawab mengawal dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan dana dari Dana Alokasi Umum yang dihasilkan di daerah. Sebagai bagian dari proses desentralisasi, penerimaan APBN disalurkan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum dalam rangka pemerataan pembiayaan pembangunan ekonomi daerah. (Mahardika, 2022). DAU memprediksi lebih sedikit kemerdekaan bagi negara bagian. Ketika ada banyak uang yang disisihkan untuk alokasi umum, hal itu menghilangkan kemampuan suatu daerah untuk membuat keputusan fiskalnya sendiri.

Tujuan utama dari dana tersebut adalah untuk menghilangkan kesenjangan keuangan daerah yang sudah ada sebelumnya. Dana Alokasi Umum harus menjadi insentif bagi peningkatan LOR. (BEARING). Departemen Perbendaharaan (DAU) akan mentransfer dana ke Pemda agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya, tetapi jika dana tersebut tidak mencukupi, Pemda harus mencari cara sendiri untuk mendapatkan lebih banyak uang. (BEARING). Pendapatan daerah yang melebihi Pendapatan Asli Daerah saat ini dihasilkan dari Dana Alokasi Umum. (Dahlia, 2022).

Tabel 1. Realisasi PAD, DAU dan Belanja Daerah Tahun 2012 – 2021

Tahun	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah
2012	315.773.358.000,00	63.640.945.338,63	518.217.383.008,61
2013	355.673.006.000,00	72.853.545.667,86	594.594.934.114,59
2014	392.221.911.000,00	102.757.907.576,34	659.079.331.972,57
2015	400.654.035.000,00	121.264.917.467,97	782.148.792.596,66
2016	428.743.959.000,00	131.920.190.720,68	857.795.223.707,67
2017	421.212.306.000,00	194.764.731.102,98	784.297.309.172,26
2018	421.212.306.000,00	163.026.005.752,93	811.030.509.443,83
2019	437.776.459.000,00	166.140.178.781,39	974.719.201.136,17
2020	400.918.516.000,00	174.590.638.444,23	868.055.395.687,07
2021	393.968.854.000,00	297.618.527.754,02	986.004.395.437,41

Sumber : BPKAD Kota Blitar

Berdasarkan tabel 1, Porsi PAD belanja daerah Blitar masih lebih rendah dari porsi Dana Alokasi Umum. Artinya, Blitar sangat bergantung pada pendanaan federal sebagai bagian dari belanja daerahnya. Kota Blitar, Mereka, seperti kebanyakan kota di Indonesia, berjuang dengan fungsi (kontribusi) PAD yang relatif kecil dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Dengan kata lain, APBD sangat bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah federal melalui mekanisme seperti hibah, subsidi, bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan sebagainya.

METODE

Untuk penelitian ini, metodologi kuantitatif digunakan. Seperti yang ditunjukkan oleh (Sugiyono, 2019) teknik kuantitatif merupakan strategi positivistik karena bergantung pada cara berpikir positivisme, teknik ini disebut juga teknik logis/logis karena memenuhi standar logika seperti semen/observasional, berkepala dingin, dapat diukur, objektif. , dan secara metodis.

Studi ini mempertimbangkan semua Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Blitar antara tahun 2012 dan 2021. Angka tersebut diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Dengan bantuan strategi dokumentasi, orang mengumpulkan informasi. Analisis statistik untuk proyek penelitian ini dilakukan dengan SPSS dan Excel 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Gunakan statistik deskriptif untuk mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang kumpulan data. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif seperti minimum, terbanyak, rata-rata, dan standar deviasi digunakan.

Tabel 2 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_DAU	10	3.16	4.38	3.9682	3.683
X2_PAD	10	6.36	2.98	1.4886	6.799
X3_BM	10	9.10	2.47	1.5242	4.809
Y_TKKD	10	13.34	41.68	22.3060	8.488
Valid N (listwise)	10				

Sumber: *Output SPSS*

Kisaran KKD ditunjukkan pada Tabel 2, dengan terendah 13,34 dan tertinggi 41,68. Rata-rata KKD menjadi 22,3060, dengan std dev 8,48812. Kisaran nilai DAU diketahui berkisar antara 3,16 hingga 4,38. Standar deviasi DAU adalah 3,68314, dan rata-ratanya adalah 3,9682. Nilai PAD terkecil yang diamati adalah 6,36, dan nilai terbesar yang diamati adalah 2,98. Ada standar deviasi 6,7998 satuan PAD dari rata-rata 1,4886. Nilai BM terendah yang diamati adalah 9,10, dan nilai tertinggi BM yang tercatat adalah 2,47. Distribusi normal BM adalah nilai 1,5242, dengan standar deviasi 4,80968.

Uji Normalitas

Untuk analisis regresi, uji normalitas menentukan apakah distribusi variabel dependen dan independen mengikuti distribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.84827152
Most Extreme Differences	Absolute	.223
	Positive	.223
	Negative	-.160
Test Statistic		.223
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 3, tingkat signifikansi yang ditentukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,173. Keseluruhan, uji signifikansi asimtotik memiliki nilai p lebih dari 0,05, menunjukkan signifikansi statistik. Teorema limit sentral memprediksi bahwa jumlah record yang diproses akan kurang dari 30. Oleh karena itu, data dapat diasumsikan berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolonieritas

Saat melakukan regresi berganda, uji multikolinearitas mengungkapkan sejauh mana variabel berkorelasi satu sama lain. Berikut hasil uji Multikolinearitas penelitian tersebut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1_DAU	.217	4.619
	X2_PAD	.644	1.553
	X3_BM	.274	3.643

a. Dependent Variable: Y_KKD

Sumber : Output SPSS

Jika Inflation Variance Factor (VIF) lebih besar dari 10, maka multikolonieritas sangat parah dalam model regresi. (Cryer, 1994:681). Dengan menggunakan tabel VIF, kita dapat menentukan bahwa (X1) = 4,618, (X2) = 1,553, dan (X3) = 3,643. Ketika asumsi klasik multikolonieritas dalam analisis regresi linier diuji, dinyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolonieritas karena nilai VIF variabel kurang dari 10. Akibatnya, kami tidak melihat adanya bukti multikolonieritas dengan faktor lainnya.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah residual suatu pengamatan berbeda secara signifikan dengan residual pengamatan lainnya dalam model regresi. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-3.092	3.708		-.834	.436
	X1_DAU	9.907	.000	.590	.775	.468
	X2_PAD	1.063	.000	.117	.265	.800
	X3_BM	-2.933	.000	-.228	-.337	.747

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel di bawah ini, analisis korelasi rank Spearman menemukan tingkat signifikansi (X1) sebesar 0,468, (X2) sebesar 0,800, dan (X3) sebesar 0,747 untuk variabel independen dan unstandardized residual. Tidak ada hubungan yang signifikan antara ketiga variabel independen (semua nilai $p > 0,05$). Oleh karena itu tidak ada heteroskedastisitas, seperti yang ditentukan oleh analisis ini. Karena semua variabel penelitian diasumsikan heteroskedastis, hal ini membuktikan asumsi tersebut.

3) Uji Autokorelasi

Jika ada lebih dari 15 pengamatan, uji autokorelasi dapat mengetahui apakah kesalahan perturbasi pada periode t terkait dengan kesalahan perturbasi pada periode $t-1$.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.498 ^a	.248	-.128	.65731	2.354

a. Predictors: (Constant), X3_BM, X2_PAD, X1_DAU

b. Dependent Variable: Abs RES

Sumber : Output SPSS

Jika nilainya tidak antara -2 dan +2, hasil analisis dianggap independen dari asumsi autokorelasi tradisional. Tabel 4.6 menampilkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa telah ditemukan adanya autokorelasi dengan nilai Durbin Watson sebesar 2,354.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda mencoba mencari tahu bagaimana satu set variabel independen (X) mempengaruhi set variabel lain (Y, Z). (MLRA). (Y). (Y). Hasil analisis SPSS regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.160	5.860		.106
	X1_DAU	-1.567	.000	-.068	.468
	X2_PAD	1.298	.000	1.040	.000
	X3_BM	-1.282	.000	-.073	.387

a. Dependent Variable: Y_KKD

Sumber : Output SPSS

Tabel 7 menampilkan persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut persamaan regresi yang kami gunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 11,160 - 1,567X_1 + 1,298X_2 - 1,282X_3$$

Dari persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- Nilai Kemandirian Keuangan Daerah (Y) bernilai positif sebesar 11,160 jika variabel DAU, PAD, dan Belanja Modal dianggap konstan.
- Jika variabel independen lainnya tetap, kenaikan X1 satu satuan akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah (Y) sebesar 1.567 satuan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda negatif pada koefisien regresi variabel tersebut. (X1).
- Kemandirian Keuangan Daerah (Y) akan naik sebesar 1.298 jika tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar satu satuan dan semua variabel bebas lainnya tidak mengalami perubahan.
- Fakta bahwa X3 memiliki koefisien regresi negatif sebesar -1,282 berarti jika X3 naik sebesar satu satuan maka kemandirian keuangan daerah (Y) akan turun sebesar 1,282 poin dengan asumsi tidak ada perubahan variabel independen lainnya.

Pengujian Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah cara statistik untuk mengukur seberapa baik satu variabel dapat memprediksi yang lain. Inilah yang dikatakan oleh koefisien determinasi:

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.990	.985	1.0389

a. Predictors: (Constant), X3_BM, X2_PAD, X1_DAU

b. Dependent Variable: Y_KKD

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 8, uji koefisien determinasi memberikan hasil sebesar 0,990 atau 99. Hal ini menunjukkan bahwa 99% pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berasal dari variabel independen (X1, X2, dan X3) dan bahwa 1% lainnya berasal dari variabel di luar ruang lingkup penelitian ini.

2) Uji F

Ini adalah tujuan dari uji F, juga dikenal sebagai uji kecocokan model, untuk memastikan dampak agregat dari semua variabel independen terhadap variabel dependen yang diminati. Tabel di bawah ini menampilkan hasil uji F:

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641.958	3	213.986	198.255	.000 ^b
	Residual	6.476	6	1.079		
	Total	648.434	9			

a. Dependent Variable: Y_KKD

b. Predictors: (Constant), X3_BM, X2_PAD, X1_DAU

Sumber : Output SPSS

Dengan nilai F 198,255 dan nilai Sig. dari 0,000, persamaan ini secara statistik tidak signifikan (yaitu, memiliki Sig. 0,000, bukan 0,05 yang diperlukan). Jadi, sejauh mana suatu daerah memiliki otonomi fiskal tergantung pada X1, X2, dan X3.

3) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t yang dilakukan untuk penelitian ini adalah:

Tabel 10. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	T
1	(Constant)	11.160	5.860		1.904
	X1_DAU	-1.567	.000	-.068	-.775
	X2_PAD	1.298	.000	1.040	20.444
	X3_BM	-1.282	.000	-.073	-.933

a. Dependent Variable: Y_KKD

Sumber : Output SPSS

Berikut penjelasan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, seperti terlihat pada tabel di atas:

- a) Hipotesis kerja pertama untuk penyelidikan ini adalah bahwa (X1) mempengaruhi (Y). Tingkat signifikansi variabel DAU adalah $0,468 > 0,05$. Oleh karena itu, kita harus menyimpulkan bahwa H_0 benar dan H_1 salah. Jika kita mengekstrapolasi hasil ini, kita menemukan bahwa (X1) tidak berhubungan dengan (Y).
- b) hipotesis kedua dari penelitian ini adalah (X2) bermanfaat bagi (Y). Tidak ada signifikansi statistik ($P 0,05$) untuk variabel PAD. Dengan demikian, H_2 tervalidasi sedangkan H_0 tidak valid. Oleh karena itu (X2) memiliki dampak besar pada (Y).
- c) Hipotesis nol ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa (X3) tidak berpengaruh terhadap (Y). PAD signifikan secara statistik ($p\text{-value} > 0,05$). Akibatnya, H_3 gagal dan H_0 berhasil sebagai hipotesis kerja. Hal itu karena korelasi antara (X3) dan (Y).

Pembahasan

1) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Temuan awal dari pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa DAU tidak mempengaruhi tingkat kemandirian ekonomi masing-masing daerah. Dengan demikian, tingkat otonomi keuangan suatu daerah tidak perlu tumbuh seiring dengan tingkat perolehan DAU, sekalipun tinggi. Demikian pula, derajat otonomi suatu daerah tidak perlu berkurang jika jumlah DAU yang diperolehnya kecil atau rendah.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kami menemukan bahwa PAD berpengaruh besar terhadap kemandirian ekonomi daerah dengan menguji hipotesis ini. Sebagian pendanaan PAD ini berasal dari pemungutan pajak, retribusi, dan pungutan wajib lainnya oleh Pemerintah Daerah. Dalam APBD, kemandirian berkaitan dengan kemandirian pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan daerah dikatakan mandiri secara finansial dan lebih mampu mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa dibebani oleh pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Semakin tinggi sumber pendapatan dari potensi daerah maka semakin mandiri daerah tersebut.

3) Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap perbedaan jenis kemandirian keuangan di berbagai daerah. Menjadi lebih mandiri secara finansial tidak selalu berarti mendapatkan lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau bagian yang lebih besar dari APBN untuk belanja modal. Penyebabnya, ketimpangan antardaerah masih terjadi karena rendahnya penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal.

SIMPULAN

Pengujian dan penelitian ini membawa kami pada kesimpulan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar tidak terpengaruh secara signifikan oleh Dana Alokasi Umum (DAU). PAD daerah berdampak positif terhadap kemampuan Kota Blitar dalam kehidupan dirinya sendiri secara ekonomi. Kemandirian keuangan daerah Kota Blitar tidak dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal. Peneliti masa depan didesak untuk mempertahankan dan memperpanjang durasi studi dan menarik dari studi tambahan variabel untuk menghasilkan temuan yang lebih dapat diandalkan.

BIBLIOGRAFI

Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

- Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar. *Ekonomika*, 5(April), 17–37. <http://eprints.upnyk.ac.id/11978/>
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *E-Proceeding of Management*, 2.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2021). *APBD Kota Blitar 2022 Defisit Rp 144 Miliar*. <https://Surabaya.Tribunnews.Com>.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2012a). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Keempat). Salemba Empat.
- Halim, A. (2012b). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Ketiga). UPPSTIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah* (Ketiga). Erlangga.
- Mahardika, E. P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11, 407–416.
- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal EK&BI*, 3, 332–337.
- Melinda, S., & Adilistiono. (2020). Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 117–128.
- Nindita, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Nurkholis, M. K. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Tim UB Press.
- Puspitasari, A., & Salisa, N. R. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1(1), 30–41.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Ketiga). BPFE-YOGYAKARTA.

Copyright holder:

Muhammad Yahya, Tituk Diah Widajantie (2023)

First publication right:

ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik